

LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara Petugas KPP Pratama Tegal

Nama : TW

Jabatan : Penyuluh Pajak

Tanggal : 14 Juli 2026

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana gambaran umum penerapan CTAS di KPP Pratama Tegal?	Secara umum, CTAS ini cukup membantu ya, soalnya sistemnya lebih terintegrasi. Jadi kami sebagai penyuluh juga lebih gampang ngakses data Wajib Pajak dan histori pelaporannya.
2	Bagaimana prosedur penerimaan pajak Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Tegal setelah diterapkannya CTAS? Apakah ada perbedaan signifikan dibandingkan sistem sebelumnya?	Ada bedanya sama DJP Online, yang kelihatan banget dari mekanisme hukum penerimaan pajak kaya dari proses administrasi sama teknologi yang dipakai. Kalau proses sebelumnya kan masih nyebar di banyak aplikasi dan harus ngecek terus-terusan, setelah ada Coretax proses dari registrasi, pembuatan kode billing, pembayaran, pencatatan penerimaan, sampai pengawasan, digabung jadi satu, akhirnya prosesnya jadi lebih cepat, akurat juga gampang dipantau sama Wajib Pajak dan petugas KPP.
3	Apa saja kendala utama yang dihadapi KPP Pratama Tegal dalam penerapan CTAS untuk melayani Wajib Pajak Badan?	Tantangannya ya dari sisi adaptasi, terutama pegawai yang sudah terbiasa manual. Terus kadang sistemnya waktu awal suka lemot atau error.
4	Dari sisi sumber daya manusia, apakah jumlah pegawai yang mendampingi Wajib Pajak Badan sudah mencukupi? Apakah ada pelatihan khusus untuk pegawai KPP Pratama Tegal mengenai aplikasi coretax?	Buat sumber daya sih cukup-cukup aja ya cuman kalo pas lagi membludak pasti kewalahan banget mba, apalagi kalo lapor SPT Badan yang satu orang aja bisa lama smpe hampir setengah jam sendiri.

5	Bagaimana kondisi literasi digital Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Tegal menurut pengamatan Bapak/Ibu? Apakah banyak yang masih kesulitan menggunakan CTAS?	Kadang Wajib Pajak belum paham dengan sistemnya. Jadi mereka masih nanya-nanya terus, dan itu butuh pendampingan ekstra
6	Menurut penilaian Bapak/Ibu, seberapa efektif CTAS dalam mempercepat proses administrasi penerimaan pajak Wajib Pajak Badan dibandingkan dengan sistem sebelumnya?	Sekarang banyak hal bisa langsung diakses digital. Ngga perlu nyari berkas fisik, jadi waktu kerja lebih efisien, Kelebihannya yang jelas lebih efisien karena tidak ada lagi pengiriman dokumen secara fisik karena kan bisa langsung ke email. Yang kedua terkait data base, data basenya benar-benar sinkron semua dan juga lebih mudah
7	Apakah ada program sosialisasi atau edukasi yang diselenggarakan KPP Pratama Tegal khusus untuk Wajib Pajak Badan terkait penggunaan CTAS?	Ada, bulan maret kemarin kita mengadakan sosialisasi LDK di kecamatan-kecamatan, Polres, sampai RSUD Kardinah juga
8	Apa harapan dan saran Bapak/Ibu untuk pengembangan CTAS ke depan agar lebih efektif mendukung penerimaan pajak Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Tegal	Kalau bisa adanya pembaruan setiap ada usulan dari KPP/petugas pajak kalau ada masalah yang perlu diperbaiki ya perlu diperbaiki. Jadi, ngga usah menunggu sampai tahun anggaran baru

Lampiran 2. Transkrip Wawancara Wajib Pajak Badan Pengguna CTAS

Nama : TF

Jabatan : Staf Akuntansi dan Pajak

Tanggal : 1 Juli 2026

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Boleh saya mengetahui nama, jabatan Bapak/Ibu di perusahaan, dan jenis usaha yang dijalankan? Sudah berapa lama terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Tegal?	Nama Tiffani, Staf Akuntansi dan Pajak di Bagian Keuangan Universitas Harkat Negeri. Universitas Harkat Negeri melakukan pelaporan pajak melalui wajib pajak Badan Yayasan Pendidikan Harapan Bersama. YPHB merupakan lembaga nirlaba

		yang terdaftar di tahun 2002. Jenis kewajiban pajak yang dikelola adalah PPH pasal 21, pasal 23, pasal 4 ayat 2, PPN KMS, dan PPh Badan.
2	Siapa yang biasanya bertanggung jawab mengelola kewajiban perpajakan badan di perusahaan Bapak/Ibu?	yang bertanggung jawab mengelola kewajiban pajak di YPHB adalah Ketua dan Bendahara Pengurus Yayasan. Namun karena transaksi perpajakan dominan di Universitas Harkat Negeri sementara PIC yang ditunjuk oleh Bendahara Yayasan adalah kepala bagian Keuangan untuk memudahkan transaksi perpajakan.
3	Bagaimana pengalaman pertama Bapak/Ibu saat mulai menggunakan CORETAX pada Januari 2025?	Pada awal menggunakan CORETAX di Januari 2025, kami mengalami cukup banyak kendala. Perubahan dari DJP online ke CORETAX dilakukan sangat mendadak, sementara pada saat mulai diwajibkan digunakan, sistemnya masih belum stabil. Proses akses dan pelaporan sering mengalami loading yang lama sehingga menghambat pekerjaan. Selain itu, sosialisasi dan panduan penggunaan masih terbatas, sehingga kami membutuhkan waktu untuk mempelajari alur kerjanya dengan mencari lewat youtube. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelaporan pajak menjadi terlambat di tahun 2025. Namun, dengan berjalannya waktu, CORETAX mulai mengalami perbaikan dan kami juga semakin terbiasa menggunakan CORETAX, sehingga proses pelaporan menjadi lebih lancar dibandingkan sebelumnya.
4	Bagaimana proses aktivasi akun dan pengaturan impersonation (penunjukan PIC) di CORETAX?	Alhamdulillah untuk proses aktivasi akun dan penunjukan PIC kami di bantu oleh AR di KPP Pratama Kota Tegal

5	Apakah proses pelaporan SPT melalui CORETAX lebih mudah atau lebih sulit dibandingkan sistem sebelumnya?	Menurut saya, tidak bisa dikatakan bahwa CORETAX lebih mudah atau lebih sulit dibandingkan DJP online. Perbedaanannya lebih pada proses adaptasi. Setiap sistem baru tentu membutuhkan waktu untuk dipahami dan dibiasakan. Harapan saya, ke depan tidak ada lagi perubahan sistem dalam waktu dekat sehingga pengguna dapat benar-benar menguasai sistem yang sudah ada. Dari sisi kelebihan di CORETAX, bukti potong dapat terbit secara otomatis saat proses pelaporan, dan setelah pembayaran status SPT langsung terlapor. Hal ini lebih praktis dibandingkan DJP online yang masih membuat billing manual dan memerlukan tahapan pelaporan setelah pembayaran. Selain itu, untuk bukti potong juga sudah masuk ke akun masing-masing wajib pajak sehingga saat pelaporan SPT Tahunan Pribadi kami tidak perlu mengirim ke setiap pegawai untuk BPA1. Namun, tidak sepenuhnya sudah sempurna, bahwa ada beberapa pegawai yang BPA1 tidak ada di dokumennya, dan ditemukan ada jumlah penghasilan di BPA1nya ada yang tidak tertotal.
6	Kendala apa saja yang pernah Bapak/Ibu hadapi saat menggunakan CORETAX?	Pada awal menggunakan CORETAX, kendala yang paling sering dialami adalah sistem yang lambat (loading lama) bahkan terkadang tidak dapat diakses, sehingga menghambat proses pelaporan pajak. Selain itu, sosialisasi mengenai penggunaan CORETAX pada saat awal masih terbatas, sehingga kami harus mempelajari sendiri alur serta fitur-fitur yang ada. Untuk mengatasi kendala tersebut, kami mencari referensi dari

		berbagai sumber, seperti tutorial di YouTube, mencoba langsung berbagai fitur pada sistem (trial and error), serta berkonsultasi dengan Account Representative (AR) di KPP apabila menemui kendala yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Seiring waktu, pemahaman terhadap CORETAX semakin baik dan penggunaan sistem menjadi lebih lancar
7	Apakah ada fitur dalam CORETAX yang menurut Bapak/Ibu membingungkan?	Pada awal penggunaan, beberapa fitur di CORETAX memang cukup membingungkan karena alurnya berbeda dengan DJP online. Salah satunya adalah mekanisme penggunaan PIC sebagai akses pengguna, impor data saat pelaporan PPh pasal 21 dan 23 yang selalu gagal diawal serta mekanisme deposit dan rekonsiliasi data yang masih membutuhkan pemahaman lebih. Sehingga di awal kami juga pernah melakukan kesalahan pengisian, bukan karena fiturnya sulit, tetapi karena masih dalam tahap memahami alur kerja CORETAX yang baru. Setelah mempelajari panduan, mencari informasi dari berbagai sumber, dan berkonsultasi dengan AR KPP, kesalahan tersebut dapat dihindari dan penggunaan sistem menjadi lebih lancar.
8	Apakah perubahan peraturan dalam PMK 81/2024 sempat menimbulkan kebingungan?	Ya, perubahan tersebut kami mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban menggunakan NIK 16 digit. Dalam proses pemotongan dan pelaporan pajak, kami harus meminta NIK kepada setiap wajib pajak yang akan diproses. Tidak semua pihak dapat langsung memberikan data tersebut, sehingga proses administrasi menjadi lebih lama. Kondisi tersebut menyebabkan

		pelaporan pajak di beberapa masa menjadi terlambat. Akibat keterlambatan tersebut, kami juga dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan.
9	Sejauh mana KPP Pratama Tegal memberikan pendampingan dan sosialisasi?	Alhamdulillah pendampingan kami dapat dari AR di KPP Pratama Tegal dan respon yang cepat ketika kami menanyakan kendala yang ada sehingga memudahkan untuk proses selanjutnya.
10	Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap kecepatan layanan KPP Pratama Tegal sejak CORETAX diterapkan?	Sejak CORETAX diterapkan, saya tidak merasakan perubahan yang signifikan terhadap kecepatan layanan di KPP Pratama Tegal. Jika harus datang langsung ke KPP, kami tetap harus mengambil nomor antrean dan terkadang waktu tunggu cukup lama karena jumlah wajib pajak yang datang banyak atau terdapat konsultasi pengguna lain yang membutuhkan waktu cukup panjang. Oleh karena itu, apabila kami ada kendala lebih memilih berkonsultasi langsung dengan Account Representative (AR) karena responsnya lebih cepat dan permasalahan dapat segera ditindaklanjuti tanpa harus datang ke kantor.
11	Secara keseluruhan, apakah penerapan CORETAX membantu perusahaan Bapak/Ibu?	Menurut saya, perubahan kepatuhan lebih dipengaruhi oleh proses adaptasi terhadap sistem baru daripada sistemnya sendiri. Pada awal penerapan CORETAX memang sempat terjadi keterlambatan pelaporan karena kendala teknis dan penyesuaian terhadap ketentuan baru. Namun, setelah memahami sistem dan prosesnya, pelaporan dapat dilakukan lebih tertib dan tepat waktu. Dengan kata lain, CORETAX tidak secara langsung meningkatkan atau menurunkan

		kepatuhan, tetapi keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada kesiapan sistem dan pemahaman pengguna.
12	Apa saran Bapak/Ibu untuk perbaikan CORETAX atau layanan KPP Pratama Tegal?	Saran saya, CORETAX perlu terus ditingkatkan agar dapat diakses dengan lancar, terutama pada saat mendekati batas akhir pelaporan ketika jumlah pengguna meningkat. Saat ini CORETAX juga masih terus mengalami pembaruan dan pengembangan. Saya berharap pembaruan yang dilakukan dapat semakin menyempurnakan sistem tanpa mengubah alur kerja secara signifikan. Ke depan, semoga tidak ada lagi perubahan sistem secara menyeluruh dalam waktu dekat, sehingga wajib pajak memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi, memahami seluruh fitur, dan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan lebih optimal

Lampiran 3. Transkrip Observasi Peneliti di KPP Pratama Tegal

Aspek Fisik dan Lingkungan KPP

No	Aspek yang Diamati	Catatan Peneliti
1	Ketersediaan ruang tunggu dan loket pelayanan yang memadai untuk WP Badan	Ruang tunggu untuk WP OP dengan WP Badan di gabungan menyebabkan antrean yang semakin terlihat panjang
2	Kondisi infrastruktur TI (komputer, jaringan internet, perangkat pendukung CTAS)	Terdapat Laptop namun mungkin seri keluaran lama yang bisa menyebabkan <i>loading</i> lama
3	Ketersediaan media informasi visual tentang CTAS (poster, brosur, layar informasi)	Beberapa tertempel di dinding, menurut saya kurang terlihat WP

4	Ketersediaan meja/loket khusus untuk konsultasi CTAS bagi WP Badan	WP Badan di khusukan dibantukan langsung oleh pegawai KPP
5	Kondisi antrian dan waktu tunggu pelayanan WP Badan	Di bulan akhir pelaporan sempat panjang dan tidak semua dilayani samapai beberapa orang memilih pulang karena menunggu terlalu lama

Proses Pelayanan dan Penggunaan CTAS

No	Aspek yang Diamati	Catatan Peneliti
1	Alur kerja pegawai dalam menerima dan memproses SPT WP Badan melalui CTAS	Pegawai terlebih dahulu melakukan verifikasi identitas dan data WP Badan pada CTAS, kemudian memeriksa kelengkapan dokumen atau status pelaporan sebelum memberikan layanan sesuai kebutuhan Wajib Pajak.
2	Cara pegawai menginstruksikan WP Badan dalam mengoperasikan portal CTAS	Pegawai memberikan penjelasan secara langsung mengenai langkah-langkah penggunaan portal CTAS, seperti proses login, pemilihan menu layanan, pengisian data, hingga penyampaian SPT atau pembuatan kode billing apabila diperlukan.
3	Kecepatan akses portal CTAS pada komputer kantor (normal / lambat / error)	Selama observasi berlangsung, portal CTAS dapat diakses dengan kondisi normal sehingga proses pelayanan berjalan lancar tanpa kendala teknis yang berarti.
4	Respons pegawai ketika WP Badan mengalami kesulitan teknis	Pegawai memberikan pendampingan secara langsung, menjelaskan penyebab kendala, serta membantu WP menyelesaikan permasalahan hingga proses layanan dapat dilanjutkan.
5	Kejelasan informasi yang disampaikan pegawai kepada WP Badan	Informasi disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Pegawai juga

		memberikan kesempatan kepada WP untuk bertanya apabila terdapat tahapan yang belum dipahami.
--	--	--

Perilaku dan Respons Wajib Pajak Badan

No	Aspek yang Diamati	Catatan Peneliti
1	Ekspresi dan respons WP Badan saat mengoperasikan CTAS (lancar / kebingungan)	Beberapa datang karena literasi perpajakan mereka tidak mengerti sama sekali, Adapun yang datang hanya untuk memastikan untuk bertanya kepada pegawai KPP
2	Frekuensi WP Badan yang meminta bantuan pegawai dalam menggunakan CTAS	Semua yang datang ke KPP perlu bantuan dari pegawai
3	Jenis pertanyaan yang paling sering diajukan WP Badan kepada petugas	Paling sering karena mereka tidak paham mengenai pelaporan CTAS terbaru
4	Tingkat kenyamanan WP Badan dalam proses pelayanan di KPP	Beberapa karena proses antrean yang terlalu Panjang menyebabkan kenyamanan berkurang
5	Apakah WP Badan sudah memahami mekanisme impersonation dan role access	Beberapa yang dari Perusahaan maupun CV mereka mengerti namun yang dari UMKM terkendala pada pemahaman

Kendala yang bisa diamati

No	Aspek yang Diamati	Catatan Peneliti
1	Gangguan teknis sistem CTAS yang terlihat selama observasi (error, loading lama, dll.)	Karena pada saat observasi peneliti datang di bulan terakhir masa pelaporan gangguan teknis sering terjadi.
2	Kesulitan pegawai dalam mengoperasikan fitur tertentu di CTAS	Semua pegawai yang handle saat pelaporan terlihat tidak mengalami kesulitan
3	Ketidaksesuaian antara prosedur yang seharusnya dan praktik di lapangan	Sudah sesuai

4	Antrean yang panjang atau penundaan layanan akibat kendala sistem	Antrean sangat panjang mengakibatkan penundaan layanan berkepanjangan
5	Kendala komunikasi antara pegawai dan WP Badan terkait prosedur baru	Beberapa dari WP memiliki Tingkat literasi yang rendah, oleh karena itu sering terjadi miss komunikasi antara pegawai dengann WP Badan yang melapor

Lampiran 4. Surat Pengantar dari Perguruan Tinggi



**Universitas
Harkat Negeri**

Sekolah Vokasi
Program Studi D-3 Akuntansi

Nomor : 209.03/D3AKT.HN/III/2026
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Tegal, 22 Juni 2026

Kepada
 KPP PRATAMA TEGAL
 di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilakukannya kegiatan Penelitian mahasiswa program studi Diploma III Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Harkat Negeri dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Tahun Akademik 2025/2026. Adapun nama mahasiswa peneliti :

NO	NAMA	NIM	JUDUL TUGAS AKHIR
1	Hilya Khairina Izzati	23030078	PENERAPAN CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM DALAM PROSES PENERIMAAN PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA TEGAL
2			
3			

Dengan ini kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melakukan kegiatan Penelitian pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin. Data yang diperoleh benar-benar hanya untuk kegiatan Penelitian Tugas Akhir dan tidak untuk dipublikasikan kepada umum.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan ijin yang diberikan diucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi D-3 Akuntansi,


 Krisdiyawati, S.E., M.Ak., Ak.
 NIPY 010.005.014

Program Studi D-3 Akuntansi, Sekolah Vokasi Universitas Harkat Negeri
 Kampus Mataram - Jalan Mataram No.9 Kota Tegal
 WhatsApp: +62-85325801717 | Surel: d3akuntansi@harkatnegeri.ac.id

Lampiran :

No	Data yang dibutuhkan:
1	Data Pengguna Coretax di Tegal dan Sekitarnya
2	Penerapan Coretax di Tegal selama 1 tahun terakhir
3	-
4	-
5	-
6	
7	
8	
9	
10	

Lampiran 5. Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Hasil Riset

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL RISET KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilya Khairina Izzati
NIM/NPWP : 23030078
Jurusan dan Fakultas : DIII Akuntansi
Perguruan : Universitas Harkat Negeri
Tinggi/Badan/Lembaga* :
Rencana Judul Riset : Penerapan Coretax Administration System
dalam Proses Penerimaan Pajak Wajib Pajak
Badan pada KPP Pratama Tegal

menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri, bahwa saya bersedia menyerahkan hasil riset kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagai persyaratan permohonan izin riset di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia untuk dikenakan sanksi penghentian layanan pemberian izin riset.

Tegal, 19 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,

Hilya Khairina Izzati
23030078

Lampiran 6. Persetujuan Izin Riset

7/9/26, 7:16 PM Gmail - e-Riset : Persetujuan Izin Riset

 Hilya Khairinaa <hilyakhairinaa52@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset
1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id> 9 Juli 2026 pukul 11.47
Balas Ke: riset@pajak.go.id
Kepada: hilyakhairinaa52@gmail.com



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381
TELEPON 024-3540416, 3545075, 3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS
www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor	: S-212/RISET/WPJ.10/2026		Semarang , 9 Juli 2026
Sifat	: Biasa		
Hal	: Persetujuan Izin Riset		

Yth Hilya Khairina Izzati
Jl. Werkudoro No. 16 Slerok

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **03778-2026** pada **22 Juni 2026**, dengan informasi:

NIM	: 23030078
Kategori riset	: GELAR-D3
Jurusan	: D3 Akuntansi
Fakultas	: Sekolah Vokasi
Perguruan Tinggi	: Politeknik Harapan Bersama
Judul Riset	: Penerapan Coretax Administration System Dalam Proses Penerimaan Badan Pada Kpp Pratama Tegal
Izin yang diminta	: Data, Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Tegal**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **9 Juli 2026 s/d 8 Januari 2027**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Teguh Pribadi Prasetya

7:16 PM

Gmail - e-Riset : Persetujuan Izin Riset



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebaran, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4

Lampiran 7. Permintaan Data Statistik di KPP Pratama Tegal

Permintaan Data Statistik

Atas Nama : Hilya Khairina Izzati
 Nomor Surat Izin : S-212/RISET/WPJ.10/2026
 Tanggal : 9 Juli 2026

Permintaan Data

1. Data Statistik Pengguna Coretax di Tegal dan Sekitarnya
2. Data Statistik Penerapan Coretax di Tegal selama 1 tahun terakhir, berupa laporan realisasi penerimaan pajak badan satu tahun terakhir dan laporan rekapitulasi SPT Tahunan PPh Badan yang masuk (tepat waktu/terlambat)
3. Data statistik perbandingan jumlah SPT yang masuk, ketepatan waktu pelaporan, dan jumlah tunggakan setelah

: diberlakukan CTAS

Pemenuhan data :

1. Data Statistik Pengguna Coretax di KPP Pratama Tegal

Sudah Aktivasi Coretax	Sudah Aktivasi Coretax dan Kode Otorisasi
76.250	64.476

2. Data Statistik Penerapan Coretax di Tegal selama 1 tahun terakhir, berupa laporan realisasi penerima Laporan realisasi penerimaan pajak badan Tahun 2025 (berdasarkan KLU; Data per 31 Desember 2025)

KLU	PENERIMAAN
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	19.720
Industri Pengolahan	153.082.334.865
Informasi dan Komunikasi	3.695.926.096
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.341.162.935
Jasa Keuangan dan Asuransi	11.668.719.754
Jasa Pendidikan	4.756.329.592
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga, Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	227.285.565
Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	2.043.138.192
Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	4.150.465.483
Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi	303.034.310
Kegiatan Jasa Lainnya	1.137.040.125
Konstruksi	46.548.643.388
Pegawai	2.972.760
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	108.159.312
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	1.240.448.376
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.397.098.774
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	143.724.182.541
Pertambangan dan Penggalian	110.295.250
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.717.766.915
Real Estate	9.846.804.201
Transportasi dan Pergudangan	5.175.490.469
Lainnya	1.885.000
Grand Total	403.279.203.623

Laporan rekapitulasi SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025 yang masuk (tepat waktu/terlambat)

Bulan	Jumlah SPT Badan
Januari	575
Februari	716
Maret	774
April	3008
Mei	1139
Juni	182

ket :

*)Juntuk Tahun Pajak 2025 batas waktu penyampaian SPT Tahunan diperpanjang untuk Wajib Pajak Badan sd 31 Mei 2026

*)Data per 30 Juni 2026

3. Data statistik perbandingan jumlah SPT yang masuk, ketepatan waktu pelaporan, dan jumlah tunggakan

*)Data SPT Tahunan Wajib Pajak Badan per 30 Juni 2026

Jumlah SPT masuk	Tepat waktu	terlambat	%tepat waktu
6394	6212	182	97%

Lampiran 8. Kartu Bimbingan Tugas Akhir

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
DOSEN PEMBIMBING I

Nama : Hilya Khairina Izzati
 NIM : 23030078
 Program Studi : D3 Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : PENERAPAN CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM
 : DALAM PROSES PENERIMAAN PAJAK BADAN
 : PADA KPP PRATAMA TEGAL
 Pembimbing I : Dr. Yuni Priatna Sari SE M.Si Ak. CA

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing I/II
1.	Senin, 5/1/2026	Pengajuan Judul	f
2.	Kamis, 8/1/2026	Pengajuan Judul	f
3.	Kamis, 15/1/2026	Pengajuan Judul	f
4.	Jumat, 13/2/2026	Bimbingan Proposal	f
5.	Kamis 7/5/2026	Bimbingan Proposal	f
6.	Senin 18/5/2026	ACC Proposal TA	f
7.	13/7/2026	Bimbingan Tugas Akhir	f
8.	16/7/2026	Bimbingan Tugas Akhir	f
9.	20/7/2026	ACC TA	f

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

DOSEN PEMBIMBING II

Nama : Hilya Khairina Israti
 NIM : 23030078
 Program Studi : D3 Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : PENERAPAN CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM.
 DALAM PROSES PENERIMAAN PAJAK BADAN
 PADA KPP PRATAMA TEGAL
 Pembimbing II : Anita Karunia SE., M.Si.

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing I/II
1.	Selasa, 13/1/2026	Pengajuan Judul	
2.	Senin, 19/1/2026	Pengajuan Judul	
3.	Kamis, 7/5/2026	Bimbingan Proposal	
4.	Paku 13/5-2026	revisi proposal - latar belakang - metode analisis	
5.	Senin 18/5-2026	revisi proposal - latar belakang - metode penelitian	
6.	Selasa 19/5-2026	ACC proposal	

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing I/II
7.	14/7-2026	konsultasi TA	
8.	15/7-2026	revisi TA - hasil penelitian - pembahasan - kesimpulan & saran	
9.	17/7-2026	revisi TA - pembahasan	
10.	17/7-2026	revisi TA - pembahasan - kesimpulan & saran	
11.	20/7-2026	ACC TA	

NB. Tiap Pembimbing Minimal 8x Bimbingan